



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-28/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN

SERTIFIKAT ELEKTRONIK

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Nomor :
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/Nomor Paspor* :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. Layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- b. Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*)khusus untuk WNA

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Surat Pernyataan Persetujuan
Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama :
Nomor Kartu Identitas :
Jabatan :

adalah sebagai Pengurus, bertindak atas nama dari:

Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini :

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum dari Perusahaan. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak, benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase*, serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase* dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak akan melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID*, *Password*, Sertifikat Elektronik dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian non-material lainnya.

Demikian surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani tanpa paksaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang menyatakan,

Meterai

Nama :
Jabatan :

BD/CAB/JO

CHECKLIST
Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik

Nama PKP :
 NPWP PKP :
 Nama Pengurus :
 Nomor Kartu Identitas Pengurus :

No	Nama Dokumen	Keterangan *)
1.	Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
Persyaratan Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik:		
1.	Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
2.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Pengurus	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) Pengurus	Ada/Tidak Ada
4.	Asli Kartu Keluarga Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus **)	Ada/Tidak Ada
6.	Softcopy pas foto terbaru Pengurus	Ada/Tidak Ada
Tambahkan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP Pusat/Tunggal		
1.	Asli SPT Tahunan PPh Badan	Ada/Tidak Ada
2.	Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan	Ada/Tidak Ada
3.	Nama Pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan	Ada/Tidak Ada
Tambahkan persyaratan dalam hal nama Pengurus tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan:		
1.	Asli Surat Pengangkatan Pengurus	Ada/Tidak Ada
2.	Asli Akta Pendirian Perusahaan	Ada/Tidak Ada
3.	Asli Penunjukan sebagai BUT/ <i>Permanent Establishment</i> dari perusahaan induk di luar negeri	Ada/Tidak Ada
4.	Fotocopy Surat Pengangkatan Pengurus	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan	Ada/Tidak Ada
6.	Fotocopy Penunjukan sebagai BUT/ <i>Permanent Establishment</i> dari perusahaan induk di luar negeri	Ada/Tidak Ada
Tambahkan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP cabang:		
1.	Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan pusat	Ada/Tidak Ada
2.	Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang	Ada/Tidak Ada
Tambahkan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP bentuk kerja sama operasi:		
1.	Fotocopy SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada
2.	Asli akta kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada
3.	Fotocopy akta kerja sama operasi	Ada/Tidak Ada

Setelah dilakukan pengecekan surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik dan kehadiran pengurus beserta dokumen yang dipersyaratkan, dinyatakan bahwa surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik atas nama PKP tersebut di atas:

..... tanggal
 Petugas Khusus KPP,

.....
 NIP

*) Coret yang tidak perlu
 **) tidak merupakan syarat bagi Warga Negara Asing



CHECKLIST
Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik
Bagi PKP Orang Pribadi/Bendahara Penerimaan

Nama PKP :
 NPWP PKP :
 Nomor Kartu Identitas PKP :

No	Nama Dokumen	Keterangan *)
1.	Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
Persyaratan Surat Permintaan/Pencabutan*) Sertifikat Elektronik:		
1.	Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik	Ada/Tidak Ada
2.	Asli SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (dikecualikan untuk Bendahara Penerimaan)	Ada/Tidak Ada
3.	Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (dikecualikan untuk Bendahara Penerimaan)	Ada/Tidak Ada
4.	Asli e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) PKP	Ada/Tidak Ada
5.	Fotocopy e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP*) PKP	Ada/Tidak Ada
6.	Asli Kartu Keluarga PKP **)	Ada/Tidak Ada
7.	Fotocopy Kartu Keluarga PKP **)	Ada/Tidak Ada
8.	Softcopy pas foto terbaru PKP	Ada/Tidak Ada
Tambahkan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP Bendahara Penerimaan:		
1.	Asli Surat Pengangkatan Bendahara Penerimaan	Ada/Tidak Ada
2.	Fotocopy Surat Pengangkatan Bendahara Penerimaan	Ada/Tidak Ada

Setelah dilakukan pengecekan surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik dan kehadiran pengurus beserta dokumen yang dipersyaratkan, dinyatakan bahwa surat permintaan/pencabutan*) Sertifikat Elektronik atas nama PKP tersebut di atas:
 Disetujui/Tidak Disetujui *)

..... tanggal
 Petugas Khusus,

.....
 NIP

*) coret yang tidak perlu
 **) tidak merupakan syarat bagi Warga Negara Asing

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/Nomor Paspor :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Telah menerima Sertifikat Elektronik dari Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak dan selanjutnya Sertifikat Elektronik ini menjadi hak kami untuk digunakan dalam rangka pemanfaatan layanan perpajakan secara elektronik.

Penyalahgunaan atas Sertifikat Elektronik menjadi tanggung jawab pihak kami sepenuhnya dan membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari penyalahgunaan Sertifikat Elektronik tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,

yang menerima,
Pihak PKP,

(.....)
NIP

(.....)

*) Khusus untuk WNA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-28/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Nomor :
Hal : Permintaan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/Nomor Paspor* :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Mengajukan permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik, dikarenakan:

- telah terjadi penyalahgunaan Sertifikat Elektronik
 potensi terjadi penyalahgunaan Sertifikat Elektronik
 passphrase tidak diketahui/lupa *passphrase*
 sebab lain.....

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

*) khusus untuk WNA

Mohon diisi dengan tanda "√"